

BPBD SULTRA TEKANKAN KABUPATEN/KOTA AGAR CEPAT RESPONS BENCANA ALAM



Sumber gambar:

https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/07/05/450099462_470115159099531_255575029100_2397704_n-1.jpg.webp

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menekankan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk secepat mungkin dalam merespons bencana alam di masing-masing wilayah.

Kepala BPBD Provinsi Sultra Muhammad Yusup di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa kondisi cuaca ekstrem yang baru-baru ini melanda Kota Kendari menyebabkan banjir yang meluas di berbagai wilayah.

"Hari ini kita berkumpul untuk memperoleh informasi terbaru tentang kondisi cuaca di masing-masing kabupaten/ kota. Ini krusial untuk perencanaan respons bencana yang lebih efektif di masa depan," kata Muhammad Yusup saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi Sultra secara daring melalui platform zoom meeting.

Dia menyebutkan bahwa untuk menangani hal tersebut, pihaknya menekankan pentingnya tindakan cepat dalam merespons setiap bencana alam yang melanda wilayah di Provinsi Sultra.

"Kami telah melakukan pemantauan langsung di lapangan, sesuai arahan dari Gubernur, untuk memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait," ujarnya.

Muhammad Yusup yang juga Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari itu menyampaikan bahwa terkait dengan masalah pengelolaan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan deforestasi yang merajalela juga patut menjadi perhatian yang serius.

"Kawasan hutan yang habis ditebang dan penyalahgunaan ruang publik harus segera ditangani untuk mengurangi risiko bencana di masa depan," kata Muhammad Yusup.

Rapat yang digelar oleh BPBD Provinsi Sultra bersama seluruh kabupaten/kota se-Sultra itu dilaksanakan untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan bencana alam yang terus mengancam di berbagai wilayah Provinsi Sultra.

Rapat tersebut ditutup dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana berbagai strategi konkret untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dibahas lebih lanjut.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/463059/bpbd-sultra-tekanan-kabupatenkota-agar-cepat-respons-bencana-alam>, “BPBD Sultra Tekankan Kabupaten/Kota Agar Cepat Respons Bencana Alam”, tanggal 05 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/804628/bpbd-sultra-gelar-rakor-penanganan-bencana>, “BPBD Sultra Gelar Rakor Penanganan Bencana”, tanggal 05 Juli 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 28:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
 - b. Pasal 40:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;

- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 31 ayat (31) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.